

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anggoro, D. D. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023.

Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pohan, Chairil Anwar. *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021.

Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 1998.

Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Stroink, F.A.M., dan J.G. Steenbeek. *Inleiding in het Staats- en Administratief Recht*. Samson H.D. Tjeenk Willink, 1985.

B. Jurnal Ilmiah

Afifulloh, A., T. A. Sn, dan S. Hadiyantina. "Politik Hukum Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah." *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata)* 2, no. 2 (2023): 97-111.

Al Faruq, M. H., M. A. Perdana, dan G. E. Ruhpinesthi. "Problematisasi Pendelegasian Pengaturan Undang-Undang Terhadap Peraturan Daerah: Studi Kasus Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di 3 (Tiga) Daerah." *Law Review* 1, no. 1 (2023): 39-56.

Arbas, C. "Reorientasi Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Upaya Meneguhkan Tujuan Bernegara." *Grondwet* 4, no. 2 (2025): 84-109.

Ariyanti, E. R. N., N. F. Chikmawati, dan M. N. A. Rahman. "Penaan Pajak Hiburan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta." *Adil: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2025): 61-84.

Elsani, D., R. Fitriani, R. Cahyono, Y. F. Aldiansyah, dan N. Fitriana. "Analisis Dinamika Perekonomian 3 Sektor dalam Konteks Pertumbuhan Ekonomi Regional." *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)* 3, no. 2 (2024): 10-20.

Fakhruzy, A. "Peranan Hukum Pajak dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 84-94.

- Fauziyah, H. F. "Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2020): 21-27.
- Handraini, H., A. Frinaldi, A. Asnil, dan N. E. Putri. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah di Kab. Pasaman Barat." *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 11, no. 2 (2024): 593-600.
- Hapsari, S. D. "Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum Restorative Justice pada Ketentuan Perpajakan." *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 6, no. 1 (2024): 52-66.
- Hariandja, F. "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi." *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 2 (2020): 154-183.
- Hartono, N. A., dan L. Ambarwati. "Optimalisasi Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Perhotelan dan Makanan dan/atau Minuman di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta." *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (2025): 403-415.
- Haryono, D., H. B. Gusliana, Z. Zulwisman, dan G. M. Saragih. "Implikasi Rasionalisasi Retribusi Bagi Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 195-211.
- Hidayat, I., dan D. S. H. Marpaung. "Tanggung Jawab Tertundanya Pembayaran Pajak Para Pelaku Usaha Tempat Hiburan Malam Dimasa Pandemi Covid-19." *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 1 (2021): 11-23.

- Jaya, A. I. B. "Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Terhadap Pengaturan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (2024): 320-348.
- Julyano, M., dan A. Y. Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13-22. DOI: 10.14710/crepido.1.1.13-22.
- Kalangi, K. N., S. Pangerapan, dan I. G. Suwetja. "Analisis Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD dalam Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah." *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 3, no. 2 (2025): 466-475.
- Kalay, L., I. Ahmad, dan N. Ismail. "Analisis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pajak Daerah." *Journal Evidence of Law* 3, no. 2 (2024): 251-264.
- Kamala, J. I., S. A. Salsa, dan W. Pangestoeti. "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 7 (2025): 120-128.
- Nashrullah, J. "Penyederhanaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (2023): 153-166.
- Prianto, W. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 08-19.

- Said, S. W., dan A. Bakar. "Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika." *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)* 5, no. 2 (2021): 1-20.
- Saragih, R. E. "Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022): 37-48.
- Satya, V. E., dan M. Suhayati. "Analisis Efektivitas Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah." *Parliamentary* 6, no. 1 (2024): 21-29.
- Sesung, R., dan S. Hadi. "Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam Perspektif Prinsip Otonomi dan Desentralisasi." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 12-22.
- Setiawan, D., dan F. Tulidawiyah. "Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018." *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA* 11, no. 3 (2020): 55-65.
- Sumalauda, R., D. Widyawati, dan J. F. Rezki. "Hubungan Vertical Fiscal Imbalance dan Local Taxing Power di Indonesia: Perbandingan Daerah Induk Vs Daerah Otonom Baru, 2010-2020." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11, no. 3 (2022): 178-190.
- Tamyn, L. I., J. D. Warongan, dan C. W. Korompis. "Analisis Komparatif Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado." *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi* 3, no. 2 (2025): 428-438.

Vientiany, D., N. Nabila, T. Nadilla, dan V. F. Bastian. "Pajak Negara dan Pajak Daerah." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024): 813-818.

Wiyatno, B., S. Harahap, dan S. Gunawan. "Urgensi Pengaturan Batas Maksimal dalam Pemberian Insentif Pajak bagi Investor di Indonesia." *Journal of Humans and Law* 6, no. 8 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i8.1759> (diakses pada 10 Februari 2026)

Yusriwati, Y., A. Alpiyandri, R. Z. Surya, dan E. S. I. Putra. "Tinjauan Teknis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 9, no. 3 (2023): 207-214.

Yusdheaputra, Wafa. "Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *Jurist-Diction* 6, no. 1 (2023): 191-214. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43557> (diakses pada 28 Maret 2026)

C. Skripsi dan Tesis

Manggiasih, Rahajeng Ayuningtyas. "Diskresi Pemerintah Daerah dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024.

Salsabila, Andi Lahfah Fida. "Analisis Potensi Pajak Daerah Setelah Penerapan UU HKPD dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta (Studi Kasus di BPKAD Kota Yogyakarta)." Skripsi, Sekolah Vokasi Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 2023.

Widhiani, Made Sri. "Analisis Efektivitas Peningkatan Tarif Pajak Hiburan: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung." Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Bali, 2025.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881.

Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Fiskal
kepada Pelaku Usaha Hiburan Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar dan
Mandi Uap/Spa.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ Tahun 2024 tentang
Pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XXII/2024. Dibacakan pada 3 Januari
2025.

E. Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha 2024*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.
<https://bali.bps.go.id/id/publication/2025/04/11/1bd49cb904702116b34cbf15/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-bali-menurut-lapangan-usaha-2020-2024.html> (diakses pada 28 Januari 2026)

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). *Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Desember 2023*. Denpasar: BPS Provinsi Bali. Jumlah kumulatif kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari-Desember 2023 mencapai 5.273.258
<https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/01/717890/perkembangan->

[pariwisata-provinsi-bali-desember-2023.html](#) (diakses pada 10 Desember 2025)

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2024). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha 2024*. Denpasar: BPS Provinsi Bali. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 10,24% (yoy) di Q4 2024
<https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/05/717941/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-iv-2024.html> (diakses pada 10 Desember 2025)

DDTC News. "Sunset Clause dalam Insentif Pajak: Urgensi dan Tantangan Implementasi." 2024. <https://news.ddtc.co.id/artikel/penelitian/33786/sunset-clause-dalam-insentif-pajak-urgensi-dan-tantangan-implementasi> (diakses pada 10 Februari 2026)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: Kemenkeu. <https://djpk.kemenkeu.go.id> (diakses pada 12 Desember 2025)

Inland Revenue Authority of Singapore. *Guide to Tax Incentives in Singapore 2023*. Singapore: IRAS, 2023, hlm. 12-20. <https://www.iras.gov.sg/taxes/corporate-income-tax/specific-topics/tax-incentives-for-businesses> (diakses pada 28 Maret 2026)

International Monetary Fund. *Options for Low Income Countries' Effective and Efficient Use of Tax Incentives for Investment*. IMF Policy Paper. Washington, D.C.: IMF, 2015. <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/100615.pdf> (diakses pada 10 Desember 2025)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax: Reconsidering Tax Incentive Offerings in Light of the Global Minimum Tax*. Paris: OECD Publishing, 2022. <https://doi.org/10.1787/25d30b96-en> (diakses pada 28 Maret 2026).

James, Sebastian. *Tax and Non-Tax Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications*. Washington D.C.: World Bank Group Investment Climate Advisory Services, 2013, hlm. 4-9. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16666> (diakses pada 28 Maret 2026)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *"Menjaga Pemulihan Sektor Pariwisata di Daerah, Pemerintah Siapkan Insentif Fiskal Untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan."* Siaran Pers HM.4.6/19/SET.M.EKON.3/01/2024, 20 Januari 2024. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5602> (diakses 28 Februari 2026)

Musgrave, Richard A., dan Peggy B. Musgrave. *Public Finance in Theory and Practice*. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1989. <https://www.nispa.org/files/publications/ebooks/Public-Finance-Theory-and-Practice.pdf> (diakses pada 12 Desember 2025)

Pemerintah Provinsi Bali. *"Rapat Koordinasi Gubernur Bali bersama Bupati/Wali Kota se-Bali: Kebijakan Insentif Fiskal PBJT Hiburan."* Bali Media Center, 26 Januari 2024. <https://www.baliprov.go.id> (diakses pada 28 Februari 2026)

Queensland Treasury. *Tax Expenditure Statement 2022-23*. Brisbane: Queensland Government, 2023, hlm. 8-14. <https://www.treasury.qld.gov.au/publications-resources/tax-expenditure-statement/> (diakses pada 28 Maret 2026)

- Thailand Board of Investment. *A Guide to the Board of Investment 2023*. Bangkok: BOI Thailand, 2023, hlm. 15-28. <https://www.boi.go.th/en/index/> (diakses pada 28 Maret 2026)
- Walikota Jaya Negara Akomodir Usulan Pelaku Usaha, Pajak Hiburan di Kota Denpasar Ditetapkan 15 Persen. Portal Resmi Pemerintah Kota Denpasar, 24 Januari 2024. <https://www.denpasarkota.go.id/berita/walikota-jaya-negara-akomodir-usulan-pelaku-usaha-pajak-hiburan-di-kota-denpasar-ditetapkan-15-persen> (diakses pada 28 Februari 2026)
- Wen, Jean-François. “Temporary Investment Incentives.” *IMF Special Series on COVID-19*. Washington, D.C.: IMF Fiscal Affairs Department, 2020. <https://www.imf.org/-/media/files/publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-temporary-investment-incentives.pdf> (diakses pada 9 Februari 2026)